PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DONGO BARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

THE ROLE OF WOMAN FOR DONGO BARU'S COMMUNITY FORESTRY MANAGEMENT IN EAST LOMBOK DISTRICT

Winda Pratiwi, Markum, dan Budhy Setiawan

Program Studi Kehutanan, Universitas Mataram
Jln. Majapahit No 62, Mataram, NTB

E-mail ;windapratiwi8978@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the level of involvement of women in the management community forestry of Dongo Baru , as well as factors affecting the involvement of women in the management of the community forest of Dongo Baru. The research location is in Sapit Village, Suela Subdistrict, East Lombok District, West Nusa Tenggara. This study used descriptive method with questionnaire tool to 42 respondents conducted in February - March 2018. Research result indicates that the role of woman viewed from 3 aspect's namely cultivated, institutional and business, included in the low category. The role of women in the management of community forest is caused by 3 factors, namely: (a) social aspect: The community still holds that those who are able to manage the organization are men. In addition, the level of education of women in HKm Dongo Baru which the average of elementary school graduates make women rarely involved in forest management activities. ; (b) cultural aspects: women are hereditary only in the care of the household and children, thus causing the low role of women in forest management. ; (c) the religious aspect: in religious teachings of Islam requires a wife to follow the words of the husband, so that everything that women do needs permission from their husbands, while husbands still have not provided a loose space to allow women to engage in forest management activities. And of those three factors, the most influencing factor is the social factor.

Keywords: *Role Of Woman,Community Forestry, Forest Management*

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan HKm Dongo Baru, serta faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pengelolaan Hkm Dongo Baru. Lokasi penelitian terletak di Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan alat bantu kuesioner terhadap 42 responden yang dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2018. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pengelolaan HKm Dongo Baru dilihat dari 3 aspek yaitu tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha, termasuk dalam kategori rendah. Peran perempuan dalam pengelolaan HKm dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu: (a) aspek sosial : Masyarakat masih berpandangan bahwa yang mampu mengelola organisasi adalah laki-laki. Selain itu tingkat pendidikan perempuan di HKm

Dongo Baru yang rata-rata tamatan SD membuat perempuan jarang dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan Hutan. ; (b) aspek budaya : perempuan secara turun temurun hanya mengurus rumah tangga dan anak, sehingga menyebabkan peran perempuan rendah dalam pengelolaan Hutan. ; (c) aspek agama : dalam ajaran agama islam mewajibkan seorang istri mengikuti perkataan suami, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan perempuan perlu izin dari suami, sementara suami masih belum memberikan ruang yang longgar untuk mengizinkan perempuan terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan. Dan dari ketiga faktor tersebut, faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor sosial.

Kata Kunci: Peran Perempuan, Hutan Kemasyarakatan, Pengelolaan Hutan.

Pendahuluan

Pengelolaan Hutan berbasis masyarakat (PHBM), yang berdasarkan PermenLHK No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 berubah menjadi perhutanan sosial, merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanam Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Kemunculan Hutan Kemasyarakatan (HKm) tentu akan melibatkan masyarakat di sekitar hutan secara langsung. Terlibatnya masyarakat akan menimbulkan perbedaan, terutama perbedaan *gander*. Dalam pengelolaan hutan laki-laki dan perempuan memiliki porsi peran yang berbeda-beda, baik dalam penentuan pekerjaan maupun kegiatan yang harus dijalankan dalam pengelolaan hutan, yaitu tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha (Listya, 2017).

Selama ini peran perempuan dalam pengelolaan sumberdaya hutan masih belum terlihat secara jelas dan dalam hal pengelolaan hutan peran perempuan masih dikatakan kurang. Hasil penelitian CIFOR (2013) menyatakan bahwa partisipasi perempuan diragam kegiatan kehutanan serta dalam kehutanan skala besar masih kurang, sehingga gambaran yang tepat mengenai keterlibatan perempuan sulit didapatkan. Hal ini menyiratkan bahwa peran perempuan dalam sektor kehutanan tidak terlihat.

Kesetaraan *gander* merupakan salah satu tujuan pembangunan millennium atau Millennium Development Goals (MDG's). Millennium Development Goals (MDG's) atau tujuan pembangunan millennium adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB. Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia memiliki dan ikut melaksanakan komitmen tersebut untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup, serta mitra kesejajaran laki-laki dan perempuan. Bila kesetaraan *gander* dalam pengelolaan hutan ini tercapai, maka akan membantu mewujudkan tujuan pembangunan millennium (Bappenas, 2009 dalam Surwadi, 2010). Namun jika dilihat dari yang terjadi di masyarakat sekitar hutan sekarang, perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun dalam pengelolaan hutan. Sedangkan jika dilihat dari potensi yang ada, perempuan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Di Lombok ada beberapa penelitian terkait dengan peran gander, namun pada penelitian-penelitian tersebut hanya sebatas melihat peran dan bentuk kegiatan perempuan dalam berumah tangga, seperti penelitian yang dilakukan oleh Halimatussadiyah (2016), dan penggambaran peran perempuan dalam tradisi kbudayaan Lombok, seperti penelitian yang dilakukan oleh Aniq (2012). Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan peran perempuan cukup banyak, namun hanya sebatas melihat tradisi, peran dan bentuk kontribusi perempuan dalam rumah tangga, dan masih sedikit yang meneliti tentang peran perempuan dalam pengelolaan hutan khususnya Hutan Kemasyaratakatn (HKm). Sepeti penelitian yang dilakukan oleh Listya (2017) terkait dengan perempuan dalam pengeloaan HKm, namun pada tempat yang berbedan dan tujuan berbeda. Dalam penelitian tersebut, peneliti hanya melihat bentuk peran perempuan dan curah waktu kerjanya pada rumah tangga. Sedangankan penelitian "Peran Perempuan dalam Pengelolaan HKm Dongo Baru Kabupaten Lombok Timur ini" ingin melihat hal berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh sebab penelitian ini perlu dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana tingkat peran perempuan dan faktor yang mempengaruhi peran perempuan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan HKm dongo Baru, serta faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pengelolaan Hkm Dongo Baru.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di HKm Dongo Baru yang terletak penelitian terletak di Dusun Sapit Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Baratpada bulan Februari - Maret 2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang diperlukan dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung ke lokasi dengan melakukan wawancara terbuka yang menggunakan serangkaian pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai data penunjang data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan lembaga-lembaga terkait yang mendukung penelitian ini.

Responden dalam penelitian ini adalah petani HKm Dongo Baru yang mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dongo Baru melalui pendekan Slovin. Dimana Menurut (Arikunto, 2002), jika populasinya besar atau lebih dari 100 maka dapat diambil tingkat kesalahan 10-15% atau 20-25% atau lebih. Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini cukup banyak, maka objek penelitian hanya diambil sebagian saja, selain itu pengambilan tingkat kesalahan 15% juga dapat dilakukan apabila populasinya homogen. Dari jumlah populasi 722 orang petani HKm Dongo Baru, maka peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 42 orang. Adapun cara dalam menentukan besarnya sampel yaitu dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 15% sebagai berikut:n = $\frac{N}{1+N(e)^2}$.

Penelitian ini dilakukan dengan teknik Penentuan sampel untuk setiap kelompokmenggunakan metode proposional random sampling, dengan rumus : n = $\frac{x}{N} N_1$, dengan teknik pengambilan incidentalsampling.

Metode analisa data dijabarkan dalam bentuk skoring dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada kegiatan tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha yaitu ditentukan dengan skoring

yang menggunakan skala likert. Perhitungan skor dilakukan dengan skala pengukuran yang dilakukan sebagai berikut (Sugiyono,2009)

a) KtT = Keterlibatan Tinggi diberi skor 3
b) CT = Cukup Terlibat diberi skor 2
c) KT = Kurang Terlibat diberi skor 1
d) TT = Tidak Terlibat diberi skor 0

Tabel 1. tingkat Keterlibatan

Tingkat Keterlibatan	Interval skor	Bobot	Kriteria
Tata Kelola Kawasan	0 – 18	4	72
Tata Kelola Usaha	0 – 18	3,5	63
Tata Kelola Kelembagaan	0 – 18	2,5	45
Jumlah			0 – 180

Pemberian bobot ini didasari oleh penelitian dari (Narsiki, 2017), dimana dilihat dari waktu kerja, peran perempuan lebih banyak terlibat pada tata kelola kawasan, kemudian tata kelola usaha dan terakhir tata kelola kelembagaan

Tabel 2. Kriteria Penilaian Tingkat Keterlibatan

Tingkat Keterlibatan	Nilai
Tinggi	121 – 180
Sedang	61 – 120
Kurang	0 – 60

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan gambaran umum mengenai latar belakang dan keadaan petani, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap 42 responden di HKm Dongo Baru diketahui bahwa kisaran umur responden yang paling banyak yaitu antara umur 36-45 tahun dengan presentase 38,09% atau dengan jumlah responden sebanyak 16 orang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sirina (2012), umur di atas 20 tahun dan di bawah dari 50 tahun merupakan umur yang sangat potensial dan memang tergolong dalam kelompok usia produktif serta masih mempunyai kemampuan fisik yang baik, sehingga masih dapat ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan untuk mengatasi permasalahan ekonomi maupun upaya dalam membentuk dan meningkatkan kualitas keluarga. Maka diketahui pada kisaran umur 36-45 tahun perempuan dikatakan dapat melakukan pengelolaan HKm karena dianggap mampu untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan HKm.

Tingkat Keterlibatan Perempuan pada kegiatan Tata Kelola Kawasan

Tabel 3. Tingkat Keterlibatan Perempuan dalam Tata Kelola Kawasan

No.	Keterlibatan (a)	Nilai Skor	Jumlah Responden (Orang)
1.	Keterlibatan Tinggi (KtT)	14-18	6
2.	Cukup Tinggi (CT)	9-13	13
3.	Kurang Terlibat (KT)	4-8	19
4.	Tidak Terlibat (TT)	0-3	4
	Jumlah		42

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018

Dari Tabel 3, dapat dilihat tingkat keterlibatan perempuan dalam kegiatan tata kelola kawasan sebagian besar adalah kurang terlibat (KT). Hal ini disebabkan karena disetiap proses pada kegiatan tata kelola kawasan, masih didominasi oleh laki-laki. Jika dilihat disetiap kegiatan pada tata kelola kawasan, terlihat peran perempuan memang tinggi. Namun setelah dilakukan perhitungan skor, sebagian besar perempuan bias dikatakan kurang terlibat. Karena pada setiap kegiatan, seperti pada proses penanaman, menyabut rumput, membersihkan lahan, menggemburkan tanah adalah kegiatan kegiatan yang memang dilakukan perempuan, tapi skor untuk keterlibatan nya rendah karena masih didominasI oleh laki-laki. Begitupun pula pada kegiatan penanaman, pemupukan, pengendalian hama, pemanenan dan pengangkutan hasil, tingkat keterlibatannya masih didominasi oleh laki-laki.

Tingkat Keterlibatan Perempuan pada kegiatan Tata Kelola Usaha

Tabel 4. Tingkat Keterlibatan Perempuan dalam Tata Kelola Usaha

No.	Keterlibatan (a)	Nilai Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	Keterlibatan Tinggi (KtT)	14-18	9	21,42
2.	Cukup Tinggi (CT)	9-13	0	0
3.	Kurang Terlibat (KT)	4-8	0	0
4.	Tidak Terlibat (TT)	0-3	33	78,58
	Jumlah		42	100

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018

Dari Tabel 4.4.2.7, dapat dilihat tingkat keterlibatan perempuan paling banyak terdapat pada kategori TT (Tidak Terlibat). Namun keterlibatan perempuan yang tinggi ini hanya terdapat pada 9 orang responden atau 21,42% responden yang diwawancarai. Dengan keterlibatan perempuan yang tinggi ini, tidak bisa mewakili seluruh 42 responden dalam kegiatan tata kelola usaha, karena dari 42 responden hanya 9 orang saja yang melakukan kegiatan tersebut. Hal ini

menyebabkan keterlibatan perempuan dalam tata kelola usaha masuk dalam kategori rendah, karena sebanyak 33 orang berada pada kategori tidak terlibat.

Tingkat Keterlibatan Perempuan pada kegiatan Tata Kelola Lembaga

Tabel 5. Tingkat Keterlibatan Perempuan dalam Tata Kelola Lembaga

No.	Keterlibatan (a)	Nilai Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	Keterlibatan Tinggi (KtT)	14-18	0	0
2.	Cukup Tinggi (CT)	9-13	0	0
3.	Kurang Terlibat (KT)	4-8	3	7,14
4.	Tidak Terlibat (TT)	0-3	39	92,86
	Jumlah		42	100

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018

Dari tabel 4.4.3.7 dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan dalam tata kelola kelembagaan sangat kurang atau tidak terlibat (TT). Hal ini membuktikan bahwa perempuan tidak dilibatkan dalam kegiatan tata kelola kelembagaan, dikarenakan tingkat pendidikan perempuan yang rata-rata hanya tamatan SD (sekolah Dasar) sehingga dianggap tidak mampu memberi kontribusi besar dalam kegiatan tata kelola kelembagaan. Selain itu ditambah lagi dengan sedikitnya perempuan yang menjadi anggota HKm, kemudian kurang nya perempuan mengeluarkan pendapat pada saat pertemuan kelompok dan tidak dilibatkannya perempuan dalam kepengurusan inti, sehingga perempuan tidak memiliki kapasitas pada saat proses pengambilan keputusan dan pembuatan awig-awighal tersebutlah yang membuat peran perempuan biasdikatakan tidak terlibat.

Keterlibatan Perempuan dalam Tata Kelola Hutan

Dari ketiga kegiatan dalam pengelolaan HKm, yaitu tata kelolah kawasan, tata kelola usaha dan tata kelola kelembagaan, menunjukan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda, seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian pada tabel 6 selanjutnya menunjukan komulatif dari keterlibatan perempuan secara keseluran.

Tabel 6. Keterlibatan Perempuan Dalam Tata Kelola Hutan

No.	Nilai Keterlibatan	Kriteria Keterlibatan Permpuan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	121 – 180	Tinggi	0	0
2.	61 – 120	Sedang	14	33,33
3.	0 – 60	Rendah	28	66,67
Jumlah			42	100

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018

Jika dilihat pada lampiran 12 tentang kriteria penilaian keterlibatan perempuan, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan sangat kurang terlibat atau keterlibatannya rendah. Hal ini dapat ditunjukan dari data-data dan pembahasan sebelumnya dan dapat dilihat pada tabel 6 yang menunjukan sebagian besar perempuan memiliki keterlibatan yang rendah. Pada tata kelola usaha perempuan memiliki keterlibatan TT (tidak Terlibat), namun hanya 21 % perempuan yang terlibat secara aktif terlibat tinggi (KTT) karena di HKm Dongo Baru hanya 9 orang responden saja yang melakukan kegiatan tata kelola usaha.

Pada tata kelola kawasan, terlihat bahwa persentase keterlibatan perempuan yang paling besar yaitu 45,23 % berada pada keterlibatan yang kurang atau kurang terlibat. Hal ini menunjukan bahwa walaupun dalam pengelolaan kawasan perempuan terlihat terlibat, namun sebernarnya yang terjadi perempuan hanya ikut membantu laki-laki, tapi dengan tingkat keterlibatan yang kurang.

Dan pada tata kelola lembaga sebanyak 92,86 % perempuan tidak terlibat seacra aktif dalam kelembagaan, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan pengalaman dari perempuan dianggap kurang, sehingga tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengeloaan.

Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan HKm

1. Aspek Sosial

Faktor sosial seringkali berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan dalam pengelolaan HKm. Seperti halnya dalam kegiatan tata kelola lembaga, masyarakat yang hidup disekitar kawasan HKm Dongo Baru masih berpikir bahwa yang mampu mengelola sesuatu, seperti organisasi dalam HKm hanya Pria, padahal dari penelitian yang dilakukan, setidaknya ada satu orang perempuan yang ikut berperperan aktif dalam berbagai organisasi, bahkan menjadi ketua di organisasi posyandu, PKK dan KWT, ingin melibatkan diri secara langsung pada pengelolaan HKm, namum belum terbuka kesempatan. Karena berdasarkan keputusan rapat yang diambil bersama seluruh kelompok, perempuan masih dianggap kurang mampu mengurus kelembagaan, hal tersbutlah yang menjadi penyebab perempuan tidak dilibatkan menjadi pengurus dalam kelembagaan HKM.

Selain itu, sosial masyarakat yang masih menganggap perempuan lemah, tidak hanya oleh pihak laki-laki namun perempuan itu sendiri menganggap dirinya tidak mampu berpartisipasi penuh dalam pengelolaan HKm. Dari penelitain yang dilakukan, dalam kegiatan tata kelola kawasan Hutan, perempuan memang terlibat, namun masih didominasi oleh laki-laki, hal ini bersangkutan dengan paradigma masyarakat bahwa perempuan memiliki fisik yang lemah ketimbang laki-laki, sehingga segala sesuatu pekerjaan berat dalam kegiatan tata kelolala kawasan masih didominasi oleh laki-laki. Namun pada kenyataannya, ada beberapa perempuan yang mengerjakan pekerjaan yang porsinya sama dengan laki-laki.

Selain itu, pada lahan HKm yang kepemilikan nya di dominasi oleh laki-laki menyebabkan perempuan tidak berperan secara aktif. Hal ini sejalan dengan penelitian Ardhana (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan lahan menjadi salah satu penyebab keresahan sehingga masyarakat, khusunya perempuan tidak berperan secara aktif dalam mengelola Hutan kemasyarakatan (HKm). Walapun ada beberapa kepemilikan lahan HKm atas nama perempuan yang berstatus janda, namun tidak di pungkiri, pada beberapa kegiatan masih di dominasi oleh laki-laki.

Dalam aspek sosial juga ada faktor pendidikan yang mempengaruhi peran perempuan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembagkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat di Desa Sapit umumnya, rata-rata pendidikan hanya tamat SD – SMP. Dari penelitian yang dilakukan, perempuan secara menyeluruh dari 42 responden, hanya berpendidikan SD-SMP. Hal inilah yang menyebabkan perempuan jarang dilibatkan dalam kegiatan pengeloaan HKm. Berbeda dengan laki-laki yang rata-rata tamatan SMA bahkan sampai sarjana strata 1 (S1). Hal ini sesuai dengan penelitian Khotimah (2009), dimana faktor pendidikan menjadikan perempuan terpinggirkan terutama didalam dunia pekerjaan.

Pendidikan yang rendah menjadi faktor yang menyebakan perempuan tidak terlalu dilibatkan, hal ini diakarenakan apabila terjadi suatu masalah dalam pengelolaan HKm, perempuan dianggap kurang cakap dalam mengambil keputusan terhadap tindakan apa yang harus diambil.

2. Aspek Budaya

masyarakat di sekitar kawasan HKm Dongo Baru terutama petani yang mengelola HKm tersebut berasumsi bahwa perempuan hanya sebatas mengurus rumah tangga dan anak. Pemikiran seperti inilah yang secara turun temurun tertanam dalam keadaan budaya masyarakat. Sehingga peran perempuan dalam pengelolaan HKm kurang. Hal ini sejalan dengan penelitian Uyun (2002) dimana masyarakat memberi pesan secara jelas kepada anak-anak sejalan dengan pertumbuhan mereka, diman buku bacaan anak-anak secara tradisional digambarkan bahwa anak perempuan dlberi stereotip peran mengasuh (nurtutant roles), sedangkan anak laki-laki diberi peran yang beorientasi fisik dan tindakan (adion-oliented roles).

Seperti halnya dalam kegiatan tata kelola kelembagaan, perempuan sangat kurang berperan, kebudayaan masyarakat disana yaitu bahwa perempuan yang menyediakan makan, minum, cemilan dan kudapan untuk tamu

apabila berlangsung pertemuan. Pemikiran yang seperti ini membuat perempuan itu sendiri tidak bisa ikut serta secara aktif dalam kegiatan tersebut.

Selain itu kegiatan dalam tata kelola kelembagaan biasanya berlangsung sampai malam hari, dan masyarakat disana memiliki kepercayaan bahwa perempuan tidak boleh meninggalkan rumah malam-malam kecuali ada keperluan mendesak. Sehingga pada saat terjadi pertemuan kelompok yang biasa diadakan malam-malam akan jarang ditemui perempuan.

Dalam kegiatan tata kelola usaha, perempuan mendominasi seluruh kegiatan yang ada didalamnya, hal ini menyangkut tradisi masyarakat disana dimana segala sesuatu yang berurusan dengan mengelola sesuatu menjadi makanan, maka perempuanlah yang terlibat dan berperan. Dan di HKm Dongo Baru, segala olahan yang dihasilkan adalah berupa makanan seperti kripik nangka, kripik pisang, dodol nangka, kopi bubuk dan kolak pisang. Sehingga mengolah bahan mentah menjadi produk siap makan adalah peran perempuan. Hal ini sejalan dengan peneltian Fannie (2000) dimana perempuan di dalam kebudayaan jawa hanya mengurus dapur, nurut suami dan ikut perkataan suami.

3. Aspek Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang sehubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan. Pada penelitian yang dilakukan masyarakat di Desa Sapit rata-rata beragama Islam. Menyangkut hal tersebut, menurut responden dalam kepercayaan agama islam perempuan diwajibkan mengikuti perkataan suami. Dimana rata-rata responden yang diwawancarai adalah istri, walaupun ada beberapa yang janda. Dari hal itulah muncul peran laki-laki yang mendominasi segala kegiatan perempuan. Sebab segala sesuatu yang dilakukan oleh perempuan harus atas seizin suami. sementara suami masih belum memberikan ruang yang longgar untuk mengizinkan perempuan terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini sejalan Muhammad (2001), dimana dalam bukunya menjelaskan bahwa perempuan masih menghadapi sergapan diman-man. Namun pemikiran-pemikiran tersebut hanya kebudayaan masyarakat masing-masing. Sebab pemikiran-pemikiran tentang perempuan yang belum diberi ruang yang bebas dalam hal melakukan sesuatu seperti laki-laki selalu tidak berangkat dari kehampaan ruang dan waktu.

Kesimpulan

1. Secara umum peran perempuan dalam pengelolaan HKm berada pada kategori rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari peran perempuan dalam 3 aspek, yaitu : (a) tata kelola kawasan : perempuan kurang terlibat (KT); (b) tata kelola usaha : perempuan memiliki keterlibatan Tidak Terlibat (TT); (c) tata kelola lembaga : perempuan tidak terlibat (TT).
2. Peran perempuan dalam pengelolaan HKm disebakan oleh 3 faktor, yaitu: (a) aspek sosial : Masyarakat masih berpandangan bahwa yang mampu mengelola organisasi adalah laki-laki. Selain itu tingkat pendidikan perempuan di HKm Dongo Baru yang rata-rata tamatan SD membuat perempuan jarang dilibatkan dalam kegiatan pengelolaam Hutan. ; (b) aspek budaya : perempuan secara turun temurun hanya mengurus rumah tangga

dan anak, sehingga menyebabkan peran perempuan rendah dalam pengelolaan Hutan. ; (c) aspek agama : dalam ajaran agama islam mewajibkan seorang istri mengikuti perkataan suami, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan perempuan perlu izin dari suami, sementara suami masih belum memberikan ruang yang longgar untuk mengizinkan perempuan terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan. Dan dari ketiga faktor tersebut, faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhana. Adnan. 2016. Aspek Sosial, Ekonomi Dan Budaya Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kphp) Banjar : Studi Kasus Di Desa Paramasan Bawah. Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru. Kalimantan Selatan.

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Cahyaningsih, Nurka., Gamal Pasya, Warsito. 2006. HKm Lampung Barat: Panduan Cara memproses Perijinan dan Kiat Sukses menghadapi Evaluasi. World Agroforestry Centre Asia Tenggara dan Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat.

CIFOR. 2013. Hutan dan Gender. Diakses pada tanggal 5 Desember 2017 .www.cifor.org/forests-trees-agroforestry.

Fananie, Z. 2000. Restrukturisasi Budaya Jawa. Perspektif KGPAA MN I. Muhammadiyah University Press. Surakarta.

Khotimah, Khusnul. 2009. Diskriminasi Gander Terhadap Perempuan dalam Sektor Pekerjaan. Pusat Studi Gander STAIN. Purwokerto.Listiya, Nur Azmi. Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Universitas Mataram. Mataram.

Listiya, Nur Azmi. Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Universitas Mataram. Mataram.

Muhammad, K.H. Husein. 2001. Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gander. PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta. Yogyakarta.

Narsiki. 2017. Peran Gender Dan Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Peraturan Mentri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-li/2008 Tentang Pehutanan Sosial.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung.

Suwardi, Megawaty. 2010. Analisis Gender Dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat Dan Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Rumah Tangga (Kasus Hutan Rakyat Di Desa Sukaresmi, Kecematan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat). Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pwertanian Bogor. Bogor.

Uyun, Qurotul. 2002. Peran Gander dalam Budaya Jawa. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.